

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

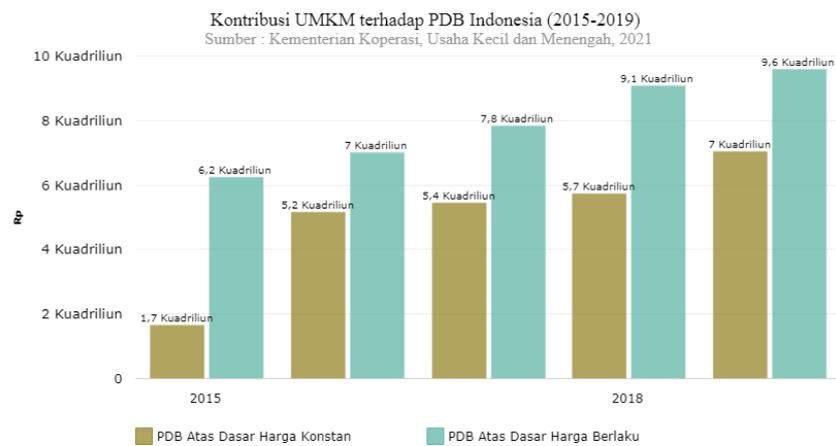
Dewasa ini, perdagangan merupakan salah satu komponen krusial yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Negara dalam rangka memajukan perekonomian dari negara itu sendiri, baik perdagangan secara mikro maupun makro. Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Triwulan III-2021 tumbuh 3,51 persen jika dibandingkan pada Triwulan III-2020. Menurut kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia, menurut lapangan usaha, pada kuartal III/2021 adalah industri pengolahan. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode tersebut diikuti oleh perdagangan sebesar 0,67 persen. Pertumbuhan ekonomi ini kemudian diikuti oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mengindikasikan bahwa peran pedagang baik kecil maupun besar, mampu mendukung terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi (Laucereno, 2019).

Peran perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi tidak lepas kaitannya dari peran penting usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan upaya ekonomi produktif yang dilakukan perseorangan ataupun badan usaha dengan perbedaan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi serta mendorong pertumbuhan

ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sektor UMKM, memunculkan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada data BPS mengenai jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin.

Titik unik lain UMKM juga terletak pada kemampuan UMKM untuk bertahan pada keadaan krisis yang pernah terjadi dimana UMKM di Indonesia tidak tergoyahkan oleh krisis ekonomi, dan hanya UMKM lah yang tetap konsisten terhadap krisis, bahkan mampu merangkak naik setiap tahunnya (Sarfiyah et al., 2019) . Keberadaan UMKM selama masa krisis ekonomi hingga sekarang menjadikan UMKM sebagai salah satu faktor penggerak utama perekonomian Indonesia (Adi, 2008). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan mampu menyerap 85 juta tenaga kerja, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebesar 1.271.529 unit dan kemudian pada tahun 2021 meningkat kembali mencapai 64,2 juta. Begitupun dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terlihat sebagai berikut.

Gambar 1.1
Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Tahun 2015 - 2019



Katadata.co.id

databoks

Sumber: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2021)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Besarnya kontribusi UMKM ini dikarenakan UMKM merupakan mayoritas penyumbang dari unit usaha di Indonesia. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Bila dibandingkan dengan Usaha Besar (UB), hanya sebesar 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia.

Perkembangan pesat UMKM nyatanya juga berdampak pada pelaku UMKM yang siap bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Hal ini senantiasa agar pelaku UMKM dapat menciptakan jenis usaha yang baru dan berbeda dengan usaha usaha yang telah terbentuk. Besarnya potensi yang dimiliki UMKM terhadap perekonomian negara tidak dapat memungkiri bahwa fakta di lapangan

menyatakan UMKM masih memiliki banyak masalah yang dihadapi seiring perkembangannya. Manajemen bisnis merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM dapat dikatakan lambat, dimana hal ini disebabkan oleh berbagai masalah konvensional yang tertumpuk karena tidak diselesaikan secara tuntas seperti masalah terkait SDM (Sumber Daya Manusia), pemasaran, pembiayaan, kepemilikan, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan UMKM itu sendiri. Oleh sebab itu, UMKM memerlukan upaya yang esensial terkait peningkatan kinerja UMKM (Suryandani & Muniroh, 2019). Kinerja usaha merupakan penentuan melalui ukuran tertentu yang mana dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan (Kusumadewi, 2017).

Bali merupakan wilayah di Indonesia yang pariwisatanya telah dikenal oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain pariwisata, kentalnya adat istiadat serta besarnya potensi alam yang dimiliki pulau Bali menjadikan masyarakat Bali melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mendirikan UMKM. Berikut perkembangan jumlah data UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2016-2020.

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten /Kota	Tahun					Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277	360%
2	Tabanan	36.690	39.980	41.459	42.744	43.715	13%

3	Badung	26.863	17.754	19.688	19.261	22.647	-16%
4	Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542	-17%
5	Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792	269%
6	Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123	3%
7	Karangasem	28.948	38.954	39.551	40.468	57.456	98%
8	Buleleng	11.196	31.563	34.552	35.555	54.489	387%
9	Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224	5%
		290.650	313.787	325.971	327.353	412.265	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dicermati bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi pertama dengan hasil 387%. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng paling besar jumlahnya dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali merupakan bagian terluas dari Provinsi Bali dengan jumlah penduduk yang mencapai 687.200 jiwa (Bulelengkab.go.id, 2019). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa adanya indikasi peningkatan serta tingginya jumlah UMKM yang mengalami perkembangan usaha. Berikut merupakan data UMKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM dan Usaha Besar di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 – 2020

No	Klarifikasi Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah
		Formal	Formal	Formal	
1.	Usaha Mikro	25.502	26.048	26.363	77.913
2.	Usaha Kecil	9.140	9.294	9.381	27.815

3.	Usaha Menengah	193	196	196	585
4.	Usaha Besar	17	17	17	51
Total		34.552	35.555	54.489	

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2021)

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2021), dapat dilihat bahwa UMKM mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, dimana dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 1003 unit dan mengalami lonjakan pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 18.934 unit. Berikut data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng per masing-masing kecamatan periode 2019-2020.

Tabel 1. 3 Data Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun		Jumlah
		2019	2020	
1	Kec. Buleleng	144	284	428
2	Kec. Gerokgak	153	115	268
3	Kec. Tejakula	120	99	219
4	Kec. Sawan	83	83	166
5	Kec. Sukasada	106	59	165
6	Kec. Busungbiu	71	55	126
7	Kec. Seririt	69	41	110
8	Kec. Banjar	95	34	129
9	Kec. Kubutambahan	45	24	69
	Total	886	794	1.680

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil (2021)

Data di atas memaparkan jumlah UMKM yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2020 penyebaran terbesar berada di Kecamatan Buleleng dengan jumlah UMKM sebesar 284 unit, dan penyebaran terkecil terletak di Kecamatan Kubutambahan. Tingginya angka perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng dikarenakan Kecamatan Buleleng merupakan pusat dari Kabupaten Buleleng (Uma et al., 2017). Hal ini berarti segala kegiatan maupun aktivitas usaha dengan berbagai macam bidang berkembang lebih banyak di Kecamatan Buleleng.

Pada kenyataannya, peningkatan angka pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng tidak diimbangi dengan kinerjanya. Sehingga menimbulkan masalah terkait kinerja UMKMinya. Berdasarkan hasil observasi awal menemukan fakta bahwa kinerja yang dimiliki UMKM di Kabupaten Buleleng tidak cukup baik. Hal ini tergambarkan melalui tidak adanya peningkatan yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya.

Tabel 1.4
Performa UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Lebih Buruk	Persentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	9,61%
2	Denpasar	4.308	13,36%
3	Gianyar	4.249	5,62%
4	Badung	3.594	15,86%
5	Tabanan	2.511	5,74%
6	Jembrana	2.370	5,12%
7	Bangli	1.222	2,76%
8	Karangasem	1.067	1,85%
9	Klungkung	614	1,71%

Total	25.166	100%
--------------	---------------	-------------

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2021)

Sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng cenderung *stuck* dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaannya. Informasi ini mendasar pada data BPS Provinsi Bali pada tahun 2020 yang memaparkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi tiga teratas terkait performa usaha kurang baik. Performa usaha merupakan segala hal terkait peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku UMKM. Tingkat performa usaha diukur berdasarkan jumlah aset maupun laba usaha yang diperoleh UMKM dalam satu periode. Berada dalam posisi 3 teratas berarti perkembangan usaha dari pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, atau hanya berjalan di tempat.

Kemampuan berkompetisi pada UMKM di masa sekarang ini bergantung pada 2 kondisi yakni, lingkungan internal serta eksternalnya. Lingkungan internal mencakup faktor faktor yang berasal dari dalam organisasi dan dikendalikan oleh pelaku usaha seperti sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya. Sumber daya manusia meliputi kualitas daripada tenaga kerja dalam suatu perusahaan yang melibatkan literasi keuangan yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Sementara sumber daya keuangan berhubungan dengan modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Selanjutnya lingkungan eksternal mencakup faktor yang berasal dari luar organisasi seperti pangsa pasar, konsumen serta stakeholders (Alberti, 2010). Keberhasilan UMKM dapat diukur berdasarkan kinerja UMKM dalam perhitungan satu periode.

Literasi keuangan sebagai salah satu faktor internal akan keberhasilan kinerja UMKM, didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pada UMKM, literasi keuangan ini memberikan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan serta akses yang membuatnya untuk lebih berkembang. Sejalan dengan pernyataan tersebut, literasi keuangan seringkali dianggap sebagai alat yang penting digunakan untuk membantu mengasah keterampilan seseorang serta meningkatkan kemampuan dalam hal pengaksesan yang terlihat dengan penerimaan dan penggunaan produk yang sesuai dengan keperluan (Deka, 2015). Menurut Nelson & Cohen (2011), literasi keuangan tidak hanya membantu dalam memahami berbagai instrumen keuangan namun juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait akses dalam menggunakan produk keuangan yang pada akhirnya berdampak pada inklusi keuangan. Leyshon (1998) mengungkapkan bahwa dengan dimilikinya literasi keuangan berarti dapat melakukan pengelolaan keuangan dan pengawasan yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila tingkat literasi keuangan seorang individu rendah, maka akan berpengaruh terhadap perilaku yang tidak rasional dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan (Mandell, 2011).

Kurangnya pengetahuan terkait literasi keuangan di Indonesia menjadi salah satu problem serius serta merupakan tantangan tersendiri bagi banyak pihak. SNLIK (Survei Nasional Literasi & Inklusi Keuangan) pada tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan pada UMKM di Bali belum mencapai 75% seperti standar yang ditetapkan, hanya mampu menyentuh angka

38% pada skala nasional (Bisnisbali.com, 2021). Kemudian permasalahan literasi keuangan juga terjadi pada UMKM di Kabupaten Buleleng. SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) pada tahun 2016 menyatakan literasi keuangan di Kabupaten Buleleng hanya mencapai angka 32,4%. Rendahnya tingkat literasi keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa tidak sistematisnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, dimana biasanya tidak adanya pemisahan yang dilakukan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal ini menyebabkan perkembangan usaha khususnya dalam hal kinerja keuangan tidak dapat diketahui secara jelas (Setyorini et al., 2012). Kebanyakan dari pelaku UMKM belum memiliki kemampuan mengelola finansial usaha mereka dengan baik, dan apabila hal ini berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang dapat berakibat pada kinerja UMKM itu sendiri serta apabila ada peningkatan dalam usaha maka akan sulit diketahui sebab pelaku usaha tidak mengetahui keuangan yang mana yang merupakan pribadi dan keuangan mana yang merupakan milik usaha.

Rendahnya literasi keuangan pada UMKM di Buleleng juga terlihat pada saat peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai beberapa pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng mengenai literasi keuangan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Buleleng yang tidak mengetahui kondisi keuangan usahanya sendiri, tidak memiliki tujuan keuangan dalam jangka panjang, tidak melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta mudah terkena investasi bodong. Hal ini merupakan dampak dari indikasi literasi keuangan yang rendah. Literasi keuangan yang rendah dalam jangka panjang tidak akan memungkinkan

UMKM yang seperti itu untuk tetap bertahan dan berkembang. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka literasi keuangan harus ditingkatkan secara berkala. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi Lamikro. Aplikasi Lamikro dapat membantu para pengusaha dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Melalui penggunaan aplikasi ini nantinya dapat mengatasi masalah yang sering dialami pelaku UMKM, yakni pencatatan laporan keuangan (Dewi et al., 2020).

Dalam menjalankan suatu usaha, efektif tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan bergantung pada kemampuan serta pengetahuan keuangan yang dimiliki individunya. Oleh sebab ini literasi keuangan merupakan hal yang krusial untuk dimiliki bagi setiap pelaku usaha, termasuk UMKM. Banyak penelitian telah memaparkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali serta mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan usahanya (Aribawa, 2016). Merujuk pada penjabaran tersebut maka variabel literasi keuangan ini menjadi variabel yang menarik untuk dilihat peranannya terhadap kinerja UMKM.

Sumber daya keuangan mencakup modal merupakan salah satu masalah krusial dalam UMKM sebab pelaku UMKM seringkali mengalami kesulitan terkait akses pembiayaan karena terkendala administrasi dan kendala lainnya. Hambatan pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan pada lembaga keuangan dikarenakan tingginya persyaratan dari bank sehingga terkadang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, instansi keuangan yang terlalu selektif dalam memilih nasabah, persepsi akan rendahnya pendapatan IRT (Ibu Rumah Tangga) sehingga tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan, pandangan terhadap

nasabah golongan rendah yang dianggap tidak menguntungkan, dan masih banyak lainnya (Sanistasya et al., 2019). Inklusi keuangan dikatakan lahir untuk mengurangi hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan. Inklusi keuangan berperan dalam meminimalisir hambatan terkait akses dan penggunaan layanan pada jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang tersedia (Yanti, 2019). Berbagai produk layanan jasa keuangan yang tersedia dapat mempermudah masyarakat tidak terkecuali pelaku UMKM dengan memutuskan produk mana yang akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan usahanya (Lumenta & Worang, 2019). Inklusi keuangan dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki masyarakat terutama di pedesaan dengan cakupan layanan yang lebih luas seperti tabungan, asuransi, kredit, dan yang lainnya (Dev, 2006). Yanti (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian dari Sanistasya et al.(2019) bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha kecil.

Dalam penelitiannya, Sanjaya (2014) mengungkapkan bahwa saat ini inklusi keuangan telah menjadi salah satu agenda penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat pada Juni tahun 2012 dimana Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan dengan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 sebagai penjabaran dari Nawa Cita juga mencantumkan mengenai upaya perluasan akses

masyarakat terhadap layanan keuangan. Program ini menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Dimana sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap jasa layanan keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkeadilan.

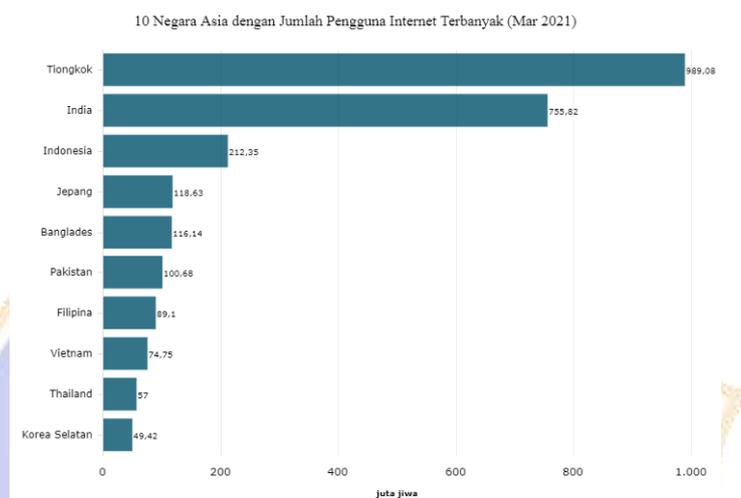
Inklusi keuangan di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Buleleng sudah termasuk tinggi yakni mencapai 92%. Namun meski sudah di atas rata-rata, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai inklusi keuangan di Bali masih belum optimal. Hal ini dikarenakan layanan website kredit usaha rakyat yakni kurbali.com belum banyak dijangkau atau diakses oleh keseluruhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang ada di Provinsi Bali. Jadi meski serapan KUR di Bali sudah baik namun belum dinilai optimal (Wiratmini, 2020). Meski demikian, angka 92% pada inklusi keuangan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan. Sementara bagi masyarakat yang belum atau tidak bisa mengakses perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya keadaan geografis setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berbeda-beda dimana hal ini mempengaruhi biaya pendirian kantor cabang perbankan yang cenderung mahal. Selain itu ketatnya persyaratan, prosedur yang kompleks, serta formalitas yang tinggi membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses perbankan (Bank Indonesia, 2014). Adriani & Wiksuana (2018) dalam penelitiannya menyatakan preferensi produk dan layanan jasa keuangan yang cukup banyak diminati masyarakat di Provinsi Bali adalah produk serta jasa layanan perbankan. Hal ini didasari oleh perilaku menabung tradisional yang mulai bergeser serta hambatan-

hambatan dalam membuka rekening tabungan mulai berkurang sehingga preferensi dalam memilih produk jasa keuangan lewat layanan perbankan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan pasar modal merupakan produk yang masih sedikit peminatnya. Hal ini karena menggunakan pasar modal membutuhkan literasi keuangan yang baik, sehingga masih sedikit masyarakat di Provinsi Bali yang terbiasa menggunakan produk pasar modal mengingat tingkat literasi keuangan di Bali yang masih rendah. Sasaran inklusi keuangan merupakan seluruh jenis kelompok masyarakat dengan mencakup tiga dimensi keuangan inklusif yakni akses, penggunaan, serta kualitas dimana inklusi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah (Bisnisbali.com, 2021). Merujuk pada penjabaran di atas maka variabel inklusi keuangan ini menjadi variabel yang menarik untuk dilihat peranannya terhadap kinerja UMKM.

Bila melihat dari sisi kebijakan sistem pembayaran, strategi dari inklusi keuangan mendorong peningkatan akses masyarakat menuju bank melalui penurunan biaya transaksi dan mendorong penggunaan digital payment. *Fintech* (*Financial technology*) merupakan perpaduan dari jasa keuangan dengan teknologi yang menghasilkan model bisnis modern. Melalui *Fintech* konsumen tidak harus melakukan pembayaran dengan tatap muka dan membawa sejumlah uang, melainkan transaksi kini lebih efisien sebab bisa dilakukan jarak jauh dan proses pembayaran melalui aplikasi hanya memakan hitungan detik saja. Pesatnya perkembangan *Fintech* juga dipengaruhi oleh jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017), perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Bahkan menurut data dari databoks.com, Indonesia menempati posisi ke 3 di Negara Asia dengan jumlah pengguna internet terbanyak untuk periode Maret 2021.

Gambar 1. 2
10 Negara Asia dengan Jumlah Pengguna Internet
Terbanyak (Per Maret 2021)



Sumber: katadata.com

Berdasarkan pada gambar di atas dapat terlihat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Sementara menunjukkan bahwa sebanyak 85% dari total populasi atau 3,4 juta orang di Provinsi Bali saat ini menjadi pengguna internet berdasar data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 (tribunnews.com). Dengan sejumlah data di atas menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang besar dalam melakukan akses layanan dikarenakan jumlah penggunaan internet yang cukup besar sehingga diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari penggunaan layanan, salah satunya layanan pembayaran yang sifatnya digital.

Otoritas Jasa Keuangan (2017) mengungkapkan bahwa produk yang sedang marak dari *Fintech* adalah *Payment gateway/digital payment* sebesar 42,22%,

kemudian diikuti dengan P2P sebanyak 17,78%, *Aggregator* 12,59%, dan terakhir *Risk and Investment Management* sebesar 28%. Salah satu *Payment gateway* yang sedang naik daun yakni OVO dan Go-Pay. OVO merupakan smart application yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Sementara Go-Pay merupakan alat pembayaran dari aplikasi Gojek. Penggunaan Go-Pay melalui aplikasi Gojek terbukti menunjang pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan volume transaksi sebesar 93% bagi mitra UMKM di Indonesia, dan sekitar 55% mitra UMKM menjadi naik kelas dari sisi klasifikasi omzet (gojek.com). Hal ini mengindikasikan pengaruh payment digital terhadap kinerja UMKM.

Selain itu, melalui inovasi “*Connected One Stop Solution*”, keuangan digital diupayakan untuk dapat membantu meningkatkan baik literasi keuangan maupun inklusi keuangan (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Penggunaan keuangan digital dapat menjadi solusi bagi inklusi keuangan dalam menurunkan biaya layanan dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang lebih aktif (Thomas & Wong, 2019). Hal ini selaras dengan hasil penelitian milik Ozili (2018), dimana *Fintech based Payment Gateway* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan utamanya bagi negara berkembang. Hal ini didasari oleh faktor kenyamanan yang dirasakan serta tingkat biaya yang lebih rendah.

Seiring berkembangnya penggunaan uang elektronik serta pembayaran digital pada saat ini membuat UMKM mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi (Dina, 2017). Apabila usaha yang mereka rintis bertahun-tahun lamanya tidak menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada, maka akan berdampak pada penurunan kinerja serta ketertinggalan dengan usaha lain yang

teknologinya lebih maju (Wibowo, 2017). Para pelaku UMKM dapat menerapkan digital payment dikarenakan tingginya permintaan konsumen. Penerapan *payment gateway* juga berpengaruh terhadap penarikan konsumen lebih banyak tanpa harus mengeluarkan biaya promosi, pengurangan ongkos operasional, serta peluang lebih besar dalam meningkatkan pemasukan usahanya. Bila melihat di lapangan, tidak sedikit para pelaku UMKM di Provinsi Bali yang mulai beralih menuju digitalisasi sebagai penunjang keberlanjutan usahanya. Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan bahwa Kabupaten Buleleng tidak masuk dalam posisi 3 teratas terkait nilai tingkat elektronifikasi transaksi. Tingkat digitalisasi Kabupaten Buleleng tergolong rendah dengan hanya mencapai nilai 2,84. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, Menengah Buleleng, I Dewa Made Sudiarta menyatakan bahwa dari total 54.849 UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdaftar, angka UMKM yang dalam kondisi aktif, baik secara langsung maupun melalui digital hanya mencapai angka 1.500 unit UMKM. Hal ini membuktikan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng belum 100% menerapkan *payment gateway* dalam pengelolaan usahanya. Dari hasil observasi awal berupa wawancara terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dilihat bahwa belum diterapkannya *payment gateway* karena didasari oleh masih minimnya kesadaran serta pengetahuan para pemilik UMKM di Kabupaten Buleleng terkait penggunaan *payment gateway* dalam pengelolaan usahanya. Oleh karenanya dibutuhkan banyak pendampingan maupun pelatihan dari pemerintah serta pihak-pihak terkait mengenai pemahaman akan digitalisasi dalam UMKM untuk menunjang pertumbuhan UMKM itu sendiri.

Dalam upaya menggiatkan pertumbuhan UMKM, penggunaan fintech secara terus menerus digiatkan oleh berbagai pihak. Dalam penelitian milik Herawati et al. (2019), penggiatan penggunaan fintech dipaparkan melalui kegiatan P2M melalui pemberian pelatihan berupa seminar. Pada kegiatan ini menekankan pada pengenalan fintech serta bagaimana prakteknya.

Beberapa penelitian menyatakan *Fintech* dapat digunakan untuk membantu pengelolaan usaha utamanya bagi pelaku yang masih memiliki keterbatasan dalam sisi ekonomi. Penelitian milik Lestari et al. (2020) menyatakan bahwa *payment gateway* memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan UMKM diukur dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Sejalan dengan pernyataan di atas, penelitian milik Purnamasari (2020) menyatakan bahwa *payment gateway* dan P2P berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Merujuk pada penjabaran di atas maka variabel *Fintech based Payment Gateway* ini menjadi variabel yang menarik untuk dilihat peranannya terhadap kinerja UMKM.

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi. Teori Atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Teori atribusi juga memaparkan serta mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menjadi motivasi atau motif seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu teori atribusi juga menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat timbul dari dua faktor, yakni dalam dan luar diri individu itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebab melalui teori ini dapat memberikan penjelasan mengenai faktor dalam dan luar yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM yang dinilai lambat oleh banyak pihak. Adapun yang

termasuk faktor dari dalam yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini adalah literasi keuangan sebab berkaitan dengan pengetahuan serta pemahaman pelaku UMKM. Kinerja UMKM yang dinilai lambat dapat dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sementara faktor dari luar adalah inklusi keuangan sebab berkaitan dengan lembaga keuangan, dimana inklusi keuangan dikatakan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan permodalan sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM dan *Fintech based Payment Gateway* sebab berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang yang mana dengan *fintech* dikatakan dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

Research gap penelitian ini terletak pada perbedaan hasil penelitian milik Dermawan (2019) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian milik Sanistasya et al. (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian milik Wulandari (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian milik Maramba MP & Rohmatul A (2019) menyatakan bahwa *payment gateway* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMK di Surabaya. Pernyataan ini kontradiksi dengan hasil penelitian milik Nurvenia & Abdullah (2021) yang menyatakan bahwa *Fintech* berbasis *Payment Gateway* berpengaruh positif terhadap Pendapatan UKM di Malang. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian milik Purnamasari (2020) yang menyatakan bahwa *Payment gateway*

berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM khususnya terkait peningkatan pendapatan pada UMKM di Kota Palembang. Research gap juga terletak pada tingginya tingkat inklusi keuangan yang tidak diimbangi oleh tingkat literasi yang tinggi pula. Hal ini tergambarkan melalui penelitian milik Adriani & Wiksuana (2018) yang menyatakan bahwa produk pasar modal masih sedikit peminatnya di Provinsi Bali sebab dibutuhkan kemampuan literasi keuangan yang baik dalam penggunaannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kebaruan variabel dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini kebaruan variabelnya yaitu pada variabel Inklusi Keuangan dan *Fintech based Payment Gateway*, dimana kedua variabel tersebut masih jarang diteliti atau digunakan oleh peneliti dalam penelitian kinerja sebelumnya. Perbedaan juga terletak pada hasil penelitian sebelumnya milik Dermawan (2019), dan Maramba MP & Rohmatul A (2019) yang menunjukkan bahwa masih terdapat inkosistensi terhadap variabel Inklusi Keuangan dan *Payment gateway* terhadap Kinerja UMKM sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian perbedaan terakhir yaitu pada lokasi, penentuan populasi, dan sampel yang berbeda dengan riset sebelumnya, dimana pada riset ini peneliti memilih lokasi riset di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan dan penentuan sampel pada penelitian ini juga mengambil setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penentuan indikator dengan cara membandingkan dari berbagai indikator yang digunakan penelitian sebelumnya. Indikator yang paling banyak maka akan digunakan pula dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan

bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, serta *Fintech based Payment Gateway* memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Berangkat dari fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul, **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan *Fintech based Payment Gateway* Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro dan kecil masih kurang pemahaman terkait literasi keuangan yang berakibat pada kinerja UMKM itu sendiri.
2. Pelaku UMKM masih belum bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik karena biasanya pelaku tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.
3. Pelaku UMKM belum memanfaatkan layanan keuangan secara optimal karena masih terkendala beberapa hal.
4. Pelaku UMKM belum semuanya menggunakan *digital payment* dalam menjalankan usahanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti oleh peneliti tidak melebar sehingga

dari berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *Fintech based Payment Gateway* terhadap kinerja UMKM.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh *Fintech based Payment Gateway* terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan *Fintech based Payment Gateway* terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Fintech based Payment Gateway* terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk menganalisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan *Fintech based Payment Gateway* terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat dijadikan referensi berikutnya mengenai kinerja UMKM. Riset ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM serta mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Hasil riset ini diharapkan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang baik untuk kinerja dari pelaku usaha itu sendiri serta mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik.

b. Bagi Peneliti

Hasil riset ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *Fintech based Payment Gateway* serta kinerja UMKM itu sendiri.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil riset ini diharapkan peneliti dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

d. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng

Hasil riset ini diharapkan peneliti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng

terkait hal-hal yang dapat mendukung peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Buleleng.

